

LAPORAN NOTULA

Rapat Pendalaman Usulan Suarise – Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital di Indonesia

Senin, 13 September 2022 – Pukul: 09.00 – 12.00

PENDAHULUAN

Suarise mengusulkan rencana aksi dengan judul Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital di Indonesia. Usulan rencana aksi ini menyorot adanya aksesibilitas digital dalam website, dokumen digital, media sosial, dan aplikasi digital. Aksesibilitas digital di dalam website secara internasional mengacu pada WCAG dimana beberapa negara di dunia sudah mengimplementasikan WCAG ke dalam regulasi negaranya masing-masing misalnya Uni Eropa, Amerika, dan Australia.

TUJUAN

Rapat pendalaman usulan penyediaan pedoman aksesibilitas digital untuk informasi, konten, dan aset digital di Indonesia bertujuan untuk:

1. Mendiskusikan paparan usulan rencana aksi yang diusulkan oleh Suarise;
2. Mendiskusikan kesesuaian usulan rencana aksi dengan rencana kerja K/L terkait.

PEMBAHASAN

1. **Ibu Rahma Utami** dari perwakilan Suarise menyampaikan bahasan sebagai berikut:
 - Aksesibilitas digital artinya bagaimana informasi digital dapat diakses dengan layak dengan beragam latar belakang pengguna;
 - Kondisi saat ini kata aksesibilitas dan inklusif merujuk pada penyandang disabilitas yang muncul dalam berbagai regulasi, yang dibutuhkan tidak hanya regulasi tetapi panduan karena adanya kebingungan dalam menemukan rujukan;
 - Regulasi yang ada sekarang ini belum mencakup isu inklusivitas terkait aksesibilitas digital, belum adanya panduan standardisasi, dan ranah informasi teknologi dan komunikasi masih hanya sampai tahap literasi digital;
 - Dari segi penerapan di website Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terdapat accessibility overlay;
 - Aksesibilitas digital yang hendak didorong adalah dalam lingkup aksesibilitas website, dokumen digital, media sosial, dan aplikasi digital;
 - Sebagai contoh di Uni Eropa terdapat penyebutan spesifik di tiap sektor mengenai akses digital apa yang harus disediakan, di Amerika dan Inggris mereka ada di bawah departemen tertentu (Amerika memiliki US Section 508). Pedoman aksesibilitas ini memiliki rujukan internasional melalui WCAG, di Australia dan Amerika memakai WCAG 2.0 sedangkan Uni Eropa memakai WCAG versi 2.1;
 - Target dari dibuatnya pedoman aksesibilitas digital ini menyorot para pembuat informasi, pembuat aplikasi, dan pembuat platform. Sedangkan target manfaatnya salah satunya ialah untuk para penyandang disabilitas;
 - Suarise dan rekan-rekan CSO yang terkait akan mencoba untuk berperan dalam beberapa hal dalam usulan rencana aksi ini, antara lain: 1) pengembangan kapasitas bagi yang terlibat dalam perencanaan pembuatan panduan; 2) Mendorong dibangunnya kanal aduan publik yang dapat diakses untuk penyandang disabilitas melaporan atau mengevaluasi secara sistematis; 3)

Pendampingan tenaga ahli dalam perencanaan pembuatan panduan.

2. **Ibu Dewi** selaku perwakilan dari Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Major project tentang transformasi digital memang sudah dicanangkan, akan tetapi jika berbicara tentang pedoman scopenya terlalu kecil akan lebih baik lagi apabila yang dikerjakan adalah untuk mendorong target-target disabilitas dimana Kemenkominfo salah satunya menargetkan untuk adanya literasi digital penyandang disabilitas;
- Lebih baik pula dilakukan monitoring dan evaluasi setiap sektor K/L terkait sudah melakukan apa, mana hal yang belum dan harus didorong, adapun Mitra Polkom sendiri ialah KIP, Dewan Pers, Komisi Penyiaran;
- Sudah terdapat Renaksi Penyandang Disabilitas (Renaksi PD), Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) khusus PD dari Kemenkominfo dimana bentuk NSPKnya berbentuk rancangan Permenkominfo dan ditujukan kepada pembuat konten;
- Dalam konteks usulan rencana aksi tidak hanya Kemenkominfo yang berkewajiban untuk mengakomodir hal tersebut tetapi Kemensos juga turut andil di dalamnya;
- Perlu diperhatikan pula proses perencanaan yang melihat aspek teknokratik, politik, dan partisipatif dalam penyusunan usulan rencana aksi.

3. **Ibu Natasya** dari perwakilan Direktorat Ketenagalistrikan, Teknologi, dan Informatika menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Harapannya output yang diberikan tidak hanya bertumpu pada adanya pedoman saja tetapi diperlukan pula next step yang dilakukan akan seperti apa
- Proyek transformasi digital memiliki PIC di Dit. KTI yang bermitra dengan Ditjen Aptika. Pilar infrastruktur di area-area 3T merupakan kewenangan dari Kemenkominfo sedangkan di area non-3T akan dibangun oleh Swasta, lebih lanjut pilar pemanfaatan merupakan tanggung jawab dari Ditjen Aptika.

4. **Ibu Iin** perwakilan dari Suarise menyampaikan pembahasan sebagai berikut:

- Suarise telah memasukan pembahasan untuk dimasukkannya infrastruktur digital dalam UU PD sebagai suatu target jangka panjang. Sementara itu target jangka menengah yang hendak disasar ialah integrasi data pusat dan daerah dan target jangka pendek yang hendak disasar adalah panduan bagi pembuat platform.

KESIMPULAN

Usulan rencana aksi yang berjudul Penyediaan Pedoman Aksesibilitas Digital untuk Informasi, Konten, dan Aset Digital di Indonesia menysasar ketersediaan aksesibilitas website, dokumen digital, media sosial, dan aplikasi digital. Adapun target dari dibuatnya pedoman aksesibilitas digital ini menysasar para pembuat informasi, pembuat aplikasi, dan pembuat platform. Sedangkan target manfaatnya salah satunya ialah untuk para penyandang disabilitas. Di dalam Kemenkominfo sendiri telah disusun NSPK khusus PD maka harus disesuaikan dan dikoordinasikan pula dengan hal tersebut dan juga RAN PD.

DOKUMENTASI